

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya dalam fatwa mengenai pembiayaan multijasa disebutkan bahwa boleh menggunakan akad ijarah dan kafalah. Tapi kebanyakan bank lebih menggunakan akad ijarah disertai dengan perwakilan atau wakalah. Ijarah sendiri merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa. Melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikutinya dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.¹

Jadi yang menjadi objek dalam akad ijarah dapat berupa barang atau juga dapat berupa jasa. Jika dalam sewa menyewa barang ada kejelasan mengenai barang yang disewa tersebut maka adanya pemanfaatan barang dengan jelas. Sedangkan dalam jasa bank hanya memberikan jasa berupa *skill* atau keahlian yang mana bank menjadi mitra yang membayar kebutuhan nasabahnya pada pihak penyedia jasa (pihak ketiga). Dalam aplikasinya di perbankan syariah akad ijarah ini salah satunya ada pada pembiayaan multijasa. Pembiayaan multijasa adalah kegiatan menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan akad ijarah yang antara lain berupa pelayanan pendidikan, kesehatan, umrah, kepariwisataan, bahkan sampai pada biaya nikah atau biaya walimah².

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani 2001), Hlm. 117

² Fatwa Dewan Syariah Nasional NO.44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa.

Adapun akad yang dipakai dalam pembiayaan multijasa ini yaitu akad ijarah dan kafalah. Akan tetapi Bank Syariah Mandiri (BSM) dalam melaksanakan pembiayaan multijasa ini dengan menggunakan akad ijarah. jika menggunakan akad ijarah maka bank di perbolehkan mengambil upah (ujrah) atau *fee* yang telah disepakati oleh kedua belah pihak di awal akad dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam prosentase. Dalam beberapa artikel telah dijelaskan bahwa dalam sewa-menyewa sesuatu yang tidak dapat dikonsumsi kecuali harus menggunakannya terlebih dahulu tidak diperbolehkan. Dalam ijarah (upah-mengupah) yang menjadi objeknya adalah jasa. Maka senantiasa Bank harus membayarkannya langsung pada penyedia jasa atau bank mengadakan kerja sama dengan pihak penyedia jasa tersebut. Karena jasanya tersebut, bank memperoleh upah atau ujrah dalam akad ijarah. Disini bank menjadi mitra yang mempertemukan antara penyedia jasa dengan nasabah dimana biaya ditanggung terlebih dahulu oleh bank syariah. Setelah demikian barulah nasabah tersebut mengangsurnya kepada bank dengan tambahan *ujrah* yang telah disepakati di awal.

Dalam menggunakan akad ijarah, nyatanya dalam praktik perbankan. Bank mewakili pada nasabah untuk membayar sejumlah dana pada pihak yang bersangkutan, Dimana dalam salah satu produknya yaitu pada dana Pendidikan. Yaitu dimana pada produk pembiayaan ini nasabah mengajukan pembiayaan untuk keperluan Pendidikan seperti alat tulis kantor (ATK), uang pembangunan dan fasilitas, serta pembayaran untuk keperluan pribadi seperti sumbangan pembinaan Pendidikan (SPP). Dalam hal ini nasabah menjadi wakil dari bank

untuk membayar pada pihak penyedia jasa. Tanpa pihak bersangkutan tahu bahwa bank syariah ikut terlibat dalam pembayaran tersebut. Dengan kata lain bank tidak melaksanakan transaksi atau jasa apapun. Apabila seperti ini maka bank tidak melakukan tugasnya untuk menyediakan jasa pada nasabah. Bank hanya memberikan dana saja. Dan kemudian bank mendapatkan ujrak atau *fee* sebesar 18-24% tergantung *plafond*. Mungkin secara logika tujuan dari perwakilan tersebut adalah supaya lebih cepat sehingga bank tidak perlu membuang banyak waktu. Bahkan dalam menentukan ujrak atau *fee* bank menyatakan dalam bentuk prosentase bukan dengan nominal. Namun dalam pelaksanaannya akad ijarah yang digunakan tidak demikian, jika bank mewakilkan pada nasabah dan menentukah ujrak atau *fee* di awal akad dengan berbentuk prosentase maka akan menimbulkan ketidaksesuaian pada akad ijarah dengan fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/VI/2000 pada poin kedua tentang objek ijarah yaitu; Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak. Dan pada Pembiayaan Multijasa dengan Fatwa DSN MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 pada poin yang pertama tentang ketentuan umum yaitu; dalam hal LKS menggunakan akad ijarah, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam fatwa ijarah, dan besar ujrak atau *fee* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk prosentase.

Dengan demikian hal ini melanggar Fatwa DSN MUI No. 9 tahun 2000 mengenai ijarah ketentuan kedua poin ke-2, yang berbunyi “Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak” Poin ke-4, “Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syari’ah” dan

poin ke-6 “Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik” serta ketentuan ketiga poin ke-1 yang berbunyi “Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan”

Yang mana artinya penerapan Pembiayaan Multijasa di bank Syariah mandiri ini belum sesuai dengan Fatwa DSN No. 44 tahun 2004 ini karena dalam Fatwa DSN MUI No. 44 tahun 2004 Ketentuan Utama Point ke-2 disebutkan bahwa “Dalam hal LKS menggunakan akad ijarah, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam Fatwa Ijarah” Selain itu pada penetapan ujah nya pun didasarkan dalam bentuk prosentase. Padahal dalam hal ini telah diatur jelas dalam Fatwa DSN MUI No. 44 tahun 2004 Ketentuan Umum point ke-5 yang berbunyi “Besar ujah atau free harus disepakati diawal akad dan dinyatakan dalam bentuk prosentase”. Secara tidak langsung ini pun melanggar syarat dalam pembiayaan multijasa dengan akad ijarah

Disini semakin terlihat bahwa aturan Fatwa DSN MUI masih belum terlaksanakan dengan baik. Terlebih lagi adanya perbedaan teori dengan kenyataan dilapangan. Oleh sebab itu, akad yang menjadi bagian dari penelitian saya ini adalah akad ijarah dan wakalah nya yang merupakan masih bagian dari pembiayaan multijasa di bank syariah. hal ini tentunya membuat saya selaku penulis tertarik untuk membahas masalah tersebut dalam penelitian skripsi yang berjudul **“ANALISIS PENERAPAN FATWA DSN MUI NO 44/DSN-MUI/VIII/2004 TERHADAP PEMBIAYAAN MULTIJASA PADA**

PRODUK DANA PENDIDIKAN DI BANK SYARIAH MANDIRI (BSM) KANTOR CABANG KOTA SUKABUMI”

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 44 tahun 2004 tentang pembiayaan multijasa. Dalam pemberian pembiayaan multijasa akad yang digunakan adalah akad ijarah hanya saja pelaksanaannya diwakilkan oleh bank pada nasabahnya padahal seharusnya bank ikut terlibat dalam pembayaran pada pihak penyedia jasa tersebut. Sehingga akad ijarah-nya terlihat jelas dan nyata. Bahkan bank menetapkan ujrak nya diawal akad dalam bentuk prosentase. Sedangkan seharusnya berbentuk nominal. Berdasarkan masalah diatas, maka penulis merumuskannya dalam pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan multijasa pada produk dana pendidikan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Kota Sukabumi?
2. Bagaimana Penerapan Fatwa DSN MUI No. 44 tahun 2004 dengan pembiayaan multijasa produk dana pendidikan di BSM Kantor Cabang Kota Sukabumi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin penulis capai diantaranya:

1. Untuk mengetahui mekanisme pembiayaan multijasa pada produk dana pendidikan yang ada pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Kota Sukabumi.
2. Untuk melihat penerapan Fatwa DSN MUI No. 44 mengenai Pembiayaan Multijasa pada produk dana pendidikan.

D. Kegunaan

1. Bagi Penulis

Mampu menambah wawasan dan pengetahuan mengenai mekanisme pembiayaan multijasa di Bank Syariah Mandiri KC Kota sukabumi serta menumbuhkan sikap kepekaan terhadap sosial.

2. Bagi Bank Syariah Mandiri

Memberikan informasi bagi pihak pengelola sehingga dapat meningkatkan kembali kualitasnya dalam pelaksanaan usahanya.

3. Bagi Para Pembaca

Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai mekanisme pembiayaan multijasa di Bank Syariah Mandiri KC Kota sukabumi serta penambahan wawasan akan akad yang digunakan dalam pembiayaan multijasa.

E. Studi Terdahulu

Penulis berusaha mencari, membaca dan mempelajari penelitian terdahulu yang terkait dengan materi penelitian yang akan penulis ambil untuk dapat menjadi acuan. Untuk membandingkan, maupun menyempurnakan penelitian terdahulu. Dalam beberapa literatur yang penulis dapatkan yang ada kaitannya dengan penulisan kajian ini yaitu sebagai berikut:

Pertama, skripsi Nisa Nurfauci Sa'adah (2014). Mahasiswa UIN SGD Bandung, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Muamalah. Penelitian skripsi berjudul "*Pelaksanaan Pembiayaan Ijarah Multijasa Tanpa Agunan di Bank Jabar Banten Syariah Kantor Pusat Braga*". Mengatakan bahwa 1) pelaksanaan pembiayaan ijarah mutijasa tanpa agunan ini khusus diberikan kepada pegawai

yang dimana perusahaan tempat pegawai/ nasabah tersebut bekerja telah memiliki kerjasama atau ikatan dengan bank, dan dalam persyaratannya bank meminta SK pegawai untuk dijadikan jaminan. 2) cara penyelesaiannya jika terjadi kredit macet Bank Jabar Banten Syariah mengutamakan cara damai dengan bermusyawarah. Penyelesaian akan dilakukan di Badan Arbitrase Syariah Nasional apabila bank dan nasabah benar-benar tidak mufakat pada hasil musyawarah tersebut. 3) pelaksanaan akad ijarah multijasa tanpa agunan dibolehkan karena telah memenuhi rukun dan syarat akad ijarah dan akad rahn dalam ketentuan fiqh muamalah.³

Kedua, skripsi Nida'ul Hoeriah (2017). Mahasiswa UIN SGD Bandung, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Muamalah. Penelitian skripsi ini berjudul *"Pelaksanaan Pembiayaan Ijarah Multijasa di BMT Mitra Sadaya Caringin Bandung"*. Mengatakan bahwa dalam pelaksanaan pembiayaan ijarah multijasa di BMT Mitra Sadaya Caringin Bandung ini lebih banyak mudharatnya dikaeranakan ketidak harmonisan dari Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang ketentuan objek ijarah dan ketentuan kementrian koperasi tentang karakteristik transaksi syariah terkait pelaksanaan yang diterapkan. Dan dari klausul akad yang tidak dicantumkan objek sewa yang merupakan rukun dan syarat terbentuknya akad yang sah (*fasad*), adanya ketidak jelasan objek tersebut

³ Nisa Nurfauci Sa'adah, *Pelaksanaan Pembiayaan Ijarah Multijasa Tanpa Agunan Di BJB Syariah KP Braga*. Skripsi S1, Universitas Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Fakultas Syariah Dan Hukum, Bandung. 2014

bisa menjadikan adanya sengketa. Karena dalam bermuamalah rukun dan syarat dari akad yang dilaksanakan merupakan hal-hal yang harus disepakati.⁴

Ketiga, skripsi Febry Purnama Nisaa Cantika (2014). Mahasiswa UIN SGD Bandung, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Muamalah. Penelitian skripsi ini berjudul “*Pelaksanaan Pembiayaan Ijarah Multijasa Di Bank Jabar Banten Syariah KCP Sumedang*”. Mengatakan bahwa penetapan ujah dalam pembiayaan multijasa di Bank Jabar Banten Syariah KCP Sumedang menggunakan metode penetapan Ujah dalam bentuk Prosentase. Hal ini menimbulkan terjadinya ketidak-sesuaian atas manfaat jasa yang diberikan. Karena hal ini bertentangan dengan ketentuan Fatwa DSN No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa, bahwa besar ujah atau *fee* harus disepakati di awal dan dalam bentuk Nominal bukan dalam bentuk Prosentase. Penetapan ujah yang telah ditetapkan oleh Bank adalah dalam bentuk Prosentase, yaitu antara 16%-17% tergantung pada *plafond* yang diajukan. Adanya ketidaksesuaian antara penerapan praktik di bank dan ketentuan Fatwa DSN No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa.⁵

Berdasarkan paparan pustaka diatas, skripsi ini memiliki beberapa perbedaan dengan skripsi terdahulu tersebut yaitu, pertama skripsi yang ditulis oleh Nisa Nurpauki Sa'adah, perbedaannya terdapat pada masalah yang diteliti yaitu pemberian pembiayaan hanya dikhususkan untuk pegawai yang telah memiliki

⁴ Nida'ul Hoeriah, *Pelaksanaan Pembiayaan Ijarah Multijasa Di BMT Mitra Sadaya Caringin Bandung*, Skripsi S1, Universitas Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Fakultas Syariah Dan Hukum, Bandung. 2017

⁵ Febry Purnama Nisaa Cantika, *Pelaksanaan Pembiayaan Ijarah Multijasa Di Bank Jabar Banten Syariah Kcp Sumedang*, Skripsi S1, Universitas Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Fakultas Syariah Dan Hukum, Bandung. 2014

SK dan SK yang dijadikan persyaratan dalam pengajuan pembiayaan multijasanya dan membahas cara penyelesaian jika terjadi kredit macet. Perbedaan dengan skripsi yang kedua yaitu dari Nida'ul Hoeriah yaitu ketidaksesuaian dengan teori ijarah yang ada dimana terdapat ketidakjelasan dalam objek sewa yang merupakan rukun dan syarat terbentuknya akad yang sah. Perbedaan dari skripsi yang terakhir yaitu dari Febry Purnama Nisaa Cantika ialah terdapat ketidaksesuaian dengan Fatwa DSN No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang pembiayaan multijasa. Dimana penetapan ujah (*fee*) yang dinyatakan dalam bentuk prosentase bukan dalam bentuk nominal. Maka terdapat ketidaksesuaian antara praktik di bank dengan ketentuan Fatwa.

Setelah melihat perbedaan-perbedaan studi terdahulu dengan ini. Penulis akan memaparkan persamaan yang terdapat pada ketiga skripsi tersebut yakni, sama-sama menggunakan akad ijarah dalam pembiayaan multijasa yang diteliti sebelumnya.

F. Kerangka Pemikiran

1. Landasan hukum

Al-Quran

قَالَتْ أَحْذِهُمَا يَابَتْ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. (Qs. Al-qasas: 26)⁶

⁶ Kementrian Agama RI, *Ar-Rahim Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2014) Hlm. 388

Yang menjadi dalil dari ayat tersebut adalah ungkapan “ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita)”. Ungkapan tersebut menunjukkan adanya jasa yang diberikan berkat kewajiban membayar upah secara patut. Ungkapan tersebut menunjukkan adanya jasa yang diberikan berkat kewajiban membayar upah (*fee*) secara patut.⁷

Hadits:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ • أَخْبَرَنَا مَالِكُ • عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الطَّوِيلِ • عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ • قَالَ: «حَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُو طَيْبَةَ • فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ • وَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يُخَفِّفُوا عَنْهُ مِنْ خَرَجِهِ»

Artinya: Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Humaid dari Anas bin Malik radliallahu 'anhu berkata; Abu Thoybah membekam Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lalu Beliau membayar dia dengan satu sha' kurma dan memerintahkan keluarganya untuk meringankan pajaknya". (HR. Bukhori, shahih)⁸

Ushul Fiqh :

الْعِبْرَةُ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا بِخُصُوصِ السَّبَبِ

Artinya: Yang dipandang dasar (titik tolak) adalah petunjuk umum dasar lafadz bukan sebab khusus.⁹

Maksudnya, dalam menggali suatu hukum yang dipandang dasar adalah petunjuk *lafadz* bukan sebab khusus.

2. Konsep multijasa

Ibnu Taimiyah berkata, tingkah laku manusia baik berupa perkataan maupun tindakan. Ada dua macam: ibadah yang dengannya ia memperbaiki

⁷ Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik...* Hlm. 108

⁸ Al Waqfeya, *Maktabah Syamilah*, Hadits Riwayat Bukhari, Hadits No.2102

⁹ Hasbiyallah, *Fiqh Dan Ushul Fiqh*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2017), Hlm. 130

agama, dan tradisi yang dengannya ia membangun dunia. Dengan mencermati pokok-pokok syariat, kita memahami bahwa ibadah yang diwajibkan dan dicintai Allah tidak dapat ditunaikan kecuali dengan syariat. Adapun adat istiadat, ia adalah sesuatu yang biasa dilakukan oleh masyarakat dalam urusan dunia mereka yang mereka butuhkan, tidak ada larangan padanya kecuali apa-apa yang dilarang Allah SWT.¹⁰

Di era modern ini, kegiatan jual beli, sewa menyewa dan perjanjian kerjasama lainnya sudah banyak dilakukan oleh lembaga-lembaga keuangan berprinsip syariah, baik berupa bank maupun non bank. Produk-produk yang diciptakan tidak lain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin konsumtif. Salah satu produk pembiayaan yang diciptakan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) untuk memenuhi kebutuhan nasabah akan suatu jasa seperti pendidikan, kesehatan, kepariwisataan, dan ketenagakerjaan adalah pembiayaan multijasa, di mana akad yang digunakan adalah akad ijarah atau kafalah.

Bank pada hakikatnya adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan milik negara, bahkan lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.¹¹

Sebagai lembaga intermediasi, maka bank syariah disamping melakukan kegiatan penghimpunan dana secara langsung kepada masyarakat dalam bentuk

¹⁰ Yusuf Qardhawi. *Halal Haram Dalam Islam*. (Solo: Era Intermedia, 2003). Hlm 40

¹¹ Chatamarrasid. *Badan hukum yayasan*. (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2009). Hlm 7

simpanan juga akan menyalurkan dan dalam bentuk pembiayaan. *Instrument* bunga yang ada dalam bentuk kredit digantikan dengan akad-akad yang berdasarkan prinsip syariah. Penerapan dari akad-akad yang berdasarkan prinsip Islam kedalam produk pembiayaan bank.¹²

Pembiayaan multijasa adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berupa transaksi multijasa dengan menggunakan akad ijarah berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan nasabah pembiayaan yang mewajibkan nasabah untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan akad.¹³

Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 44 Tahun 2004 tentang Pembiayaan Multijasa, ialah pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa.¹⁴

Akad yang digunakan dalam pembiayaan multijasa ini ada dua, yaitu akad ijarah. Ijarah dalam fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 9 Tahun 2000 adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.¹⁵

Maka, dapat disimpulkan bahwa ijarah adalah akad yang digunakan untuk melakukan jual beli manfaat atas suatu barang atau jasa (sewa menyewa) atau jasa

¹² Abdul Ghofur Anshori. *Perbankan Syariah Indonesia*. (Yogyakarta: 2008). Hlm 20

¹³ Erwandi Tarmizi. *Pembiayaan Multijasa*. www.Erwantarizi.Wordpress.Com. Diakses Pada 20 April 2019 pukul 17.00

¹⁴ Fatwa Dewan Syariah Nasional NO.44/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Pembiayaan Multijasa.

¹⁵ Rachmat Syafe'i. *Fiqh Muamalah*. (Bandung: Pustaka Setia, 2001). Hlm 121-122

(upah mengupah) dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan ketika akad.

Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pembiayaan Ijarah menyebutkan bahwa salah satu kewajiban Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sebagai pemberi manfaat barang atau jasa adalah menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan.

Secara umum, timbulnya ijarah disebabkan oleh adanya kebutuhan akan manfaat suatu barang atau jasa dari nasabah yang tidak memiliki kemampuan keuangan. Dengan kata lain, praktik pelaksanaan akad ijarah di perbankan syariah ini merupakan perubahan cara pembayaran hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dari tunai di muka menjadi angsuran.

Adapun wakalah yaitu berarti penyerahan, delegasian, atau pemberian *mandate*. Dalam bahasa arab, hal ini dapat dipahami sebagai *at-tafwidh*. Akan tetapi, yang dimaksud sebagai *al-wakalah* disini adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal yang diwakilkan.¹⁶

Wakalah (*deputyship*), atau biasa disebut perwakilan, adalah pelimpahan kekuasaan oleh suatu pihak (*muwakil*) kepada pihak lain (wakil) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Atas jasanya, maka penerima dapat meminta imbalan tertentu dari pemberi amanah.¹⁷

Produk pembiayaan multijasa idealnya dilakukan dengan menggunakan akad ijarah atau kafalah, di mana jika Lembaga Keuangan Syariah menggunakan akad ijarah, maka harus mengikuti ketentuan yang ada dalam fatwa ijarah. Jika

¹⁶ Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*.... Hlm 120-121

¹⁷ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2007), Hlm 104

Lembaga Keuangan Syariah menggunakan akad kafalah, maka harus mengikuti ketentuan yang ada dalam fatwa kafalah. Tapi pada kasus ini, pembiayaan multijasa dilaksanakan seperti murabahah, di mana bank mewakili kepada nasabah untuk menyewa aset atau melakukan jasa yang dibutuhkannya atas nama bank yang kemudian nantinya bank akan menyewakannya kembali kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi. Di sini, bank hanya memfasilitasi sejumlah dana yang dibutuhkan nasabah untuk memenuhi kebutuhan pembayaran biaya pendidikan, kesehatan, kepariwisataan atau ketenagakerjaan, dengan syarat nasabah harus melampirkan bukti-bukti pembayaran untuk diserahkan kepada bank sebagai bukti bahwa pembiayaan telah dilaksanakan dengan baik.

Jika dilihat dari fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pembiayaan Ijarah, dalam ketentuan umumnya dikatakan bahwa salah satu kewajiban Lembaga Keuangan Syariah sebagai pemberi manfaat barang atau jasa adalah menyediakan barang atau jasa yang diberikan.

Dewan Syariah Nasional masih bisa memaklumi apabila pelaksanaan pembiayaan multijasa dilaksanakan seperti pada kasus di atas, dengan syarat nasabah yang bersangkutan harus melampirkan bukti-bukti pembayaran. Akan tetapi, timbul permasalahan lain, dalam kasus ini nasabah tidak melampirkan bukti-bukti pembayaran yang seharusnya dilampirkan kepada bank sebagai tanda bukti bahwa pembiayaan telah dilaksanakan sesuai dengan akad. Di sini pihak bank juga tidak melakukan tindakan apapun kepada nasabah yang bersangkutan, sehingga masih terdapat kejanggalan dalam pembiayaan multijasa tersebut.

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang dilakukan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (*independent*) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkannya dengan variabel lain.¹⁸ Jadi secara singkat, dikatakan penelitian deskriptif jika penelitian yang dilakukan bersifat pemaparan atau menjelaskan tentang *Ujrah* dan pelaksanaan pembiayaan multijasa di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Kota Sukabumi

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Kota Sukabumi, jalan Jend. Sudirman No.Blok 112, Gunungparang, Kec. Cikole, Kota Sukabumi, Jawa Barat 43131

3. Jenis Data

Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data deskriptif kualitatif, penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah, dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah. Dimana penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti. Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat atau kepercayaan orang yang diteliti dan kesemuanya tidak dapat diukur dengan angka.

¹⁸ Ety Rochaety, dkk, *Metodologi Penelitian Bisnis Dengan Aplikasi SPSS*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2009), hlm.17

4. Sumber Data

a. Sumber data primer

Yaitu informasi yang diperoleh secara langsung dari pihak yang terlibat dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis. Berupa pendapat subjek secara individual atau kelompok, hasil observasi yang dilakukan oleh penulis. Diperoleh dari hasil wawancara pada *retal banking relationship manager* di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Kota Sukabumi.

b. Sumber data sekunder

Yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung. Biasanya didapat dari media perantara. Disini penulis mendapatkan data melalui arsip atau dokumen yang menjadi alat bukti untuk menjawab yang menjadi masalah peneliti. Diperoleh dari berbagai catatan, artikel serta buku-buku yang merupakan literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi yang dilakukan oleh penulis adalah pengamatan terhadap proses atau mekanisme dalam pembiayaan multijasa yang dilakukan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Kota Sukabumi. Tujuan dari observasi adalah untuk memperoleh data yang sebenarnya dengan melakukan pengamatan langsung pada mekanisme pembiayaan multijasa di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Kota Sukabumi.

b. Wawancara

Suatu tehnik pengumpulan data dengan menggali informasi secara langsung pada pihak-pihak yang terkait. Penulis menyiapkan dan mengajukan beberapa pertanyaan yang sebelumnya disusun kepada staff seputar mekanisme pembiayaan multijasa di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Kota Sukabumi, sehingga diharapkan mendapatkan data yang sesuai dan akurat.

c. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan sarana pengumpulan data yang bersifat kualitatif dengan mencari data dari berbagai buku, artikel dan sumber tertulis lainnya. Yang mana hasilnya dapat dijadikan sebagai landasan atau sumber data pelengkap mengenai konsep, teori, dan praktik pembiayaan multijasa di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Kota Sukabumi.

6. Analisis Data

Ada pun langkah terakhir yang dilakukan oleh penulis adalah menganalisis data dengan cara sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data. Langkah ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan berbagai informasi yang diperoleh mengenai penetapan *ujrah* pada pembiayaan multijasa di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Kota Sukabumi.
- b. Menyeleksi data-data yang telah diperoleh dengan cara mengelompokkan data-data yang diperoleh saat penelitian.
- c. Menganalisis data, merupakan tahapan dari proses penelitian. Yang mana akan diperoleh jawab-jawaban atas permasalahan dalam penelitian yang dilakukan.